



PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan Pelaksana dan penambahan jenjang Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penyesuaian kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan penetapan kelas jabatan berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 748), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

1. Bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang belum memenuhi syarat jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pelaksana dimaksud wajib memenuhi syarat jabatan paling lama tanggal 23 Agustus tahun 2029.
2. Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

☐

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN  
2023 TENTANG KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala LKPP	
2.	Sekretaris Utama	17
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
4.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
5.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	15
6.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	17
7.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
8.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
9.	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
10.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	17
11.	Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	15
12.	Direktur Sistem Pengadaan Digital	15
13.	Direktur Pasar Digital Pengadaan	15
14.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	17
15.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
16.	Direktur Sertifikasi Profesi	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
17.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	17
18.	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
19.	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
20.	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15
21.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	15
22.	Kepala Pusat Data dan Informasi	15
23.	Inspektur	15

**B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
<b>Jabatan Administrator</b>		
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Protokol	12
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
<b>Jabatan Pengawas</b>		
1.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	9
2.	Kepala Subbagian Protokol	9
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha I	9
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha II	9
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
2.	Penata Keprotokolan	7
3.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
4.	Penata Layanan Operasional	7
5.	Pengolah Data dan Informasi	6
6.	Pengelola Layanan Operasional	6
7.	Pengelola Keprotokolan	6
8.	Pengelola Layanan Pengadaan	6

C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
2.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
3.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
7.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
11.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
12.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
13.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
14.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
15.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
16.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
17.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Utama	14
18.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	12
19.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
20.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
21.	Arsiparis Ahli Madya	11
22.	Arsiparis Ahli Muda	9
23.	Arsiparis Ahli Pertama	8
24.	Arsiparis Penyelia	8
25.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
26.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
27.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14
28.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
29.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
30.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
31.	Auditor Ahli Utama	14
32.	Auditor Ahli Madya	12
33.	Auditor Ahli Muda	10
34.	Auditor Ahli Pertama	8
35.	Auditor Penyelia	9
36.	Auditor Mahir	7
37.	Auditor Terampil	6
38.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
39.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
40.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8
41.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
42.	Penata Laksana Barang Mahir	8
43.	Penata Laksana Barang Terampil	7
44.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
45.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
46.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
47.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
48.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
49.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
50.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
51.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
52.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
53.	Perencana Ahli Madya	12
54.	Perencana Ahli Muda	10
55.	Perencana Ahli Pertama	8
56.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
57.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
58.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
59.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
60.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
61.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
62.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
63.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
64.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
65.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
66.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
67.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
68.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
69.	Pranata Komputer Penyelia	8
70.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
71.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
72.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
73.	Pustakawan Ahli Muda	9
74.	Pustakawan Ahli Pertama	8
75.	Sandiman Ahli Madya	12
76.	Sandiman Ahli Muda	10
77.	Sandiman Ahli Pertama	8
78.	Statistisi Ahli Madya	11
79.	Statistisi Ahli Muda	9
80.	Statistisi Ahli Pertama	8
81.	Widyaiswara Ahli Utama	14
82.	Widyaiswara Ahli Madya	12
83.	Widyaiswara Ahli Muda	10
84.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI